

**PERUBAHAN GEOMARITIM KAWASAN PASCA RESTRUKTURISASI US
PASIFIC COMMAND TERHADAP KEAMANAN MARITIM INDONESIA
(Study Kasus Laut China Selatan)**

**REGIONAL GEOMARITIME CHANGES AFTER RESTRUCTURING US PACIFIC
COMMAND TOWARDS INDONESIA MARITIME SECURITY
(Case Study of the South China Sea)**

Novia Nindyarizki¹, Marsetio², Abdul Rivai RAS³

Universitas Pertahanan
(n.nindyarizki@gmail.com)

Abstrak - *United States Pasific Command (US PACOM)* merupakan komando militer Amerika Serikat yang memiliki *Area Of Responsibility* di lingkup Asia-Pasifik. Perkembangan dalam hal keamanan penting untuk diwaspadai, terutama modernisasi kekuatan militer China. Amerika Serikat merasa perlu untuk melakukan penilaian kembali terhadap strategi, postur pertahanan dan kekuatan yang diwujudkan dengan adanya restrukturisasi *US PACOM* menjadi *United States Indo-Pasific Command (US Indo-Pacom)*. Amerika Serikat ingin memastikan Indo-Pasifik bebas dari hal yang dapat mengganggu kepentingan mereka terutama dengan China yang membangun fasilitas militer di Laut China Selatan (LCS). Kawasan LCS relatif tidak stabil dan dapat menjadi ancaman bagi Keamanan Maritim Indonesia apabila terjadi kontinjensi. Penelitian ini menganalisa strategi Amerika Serikat dalam rangka mempertahankan hegemoni di LCS dan untuk mengetahui upaya Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik di LCS dan menjaga keamanan maritim Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif, peneliti menemukan lima Strategi besar Amerika Serikat yang digunakan untuk mempertahankan hegemoninya di LCS yaitu dengan *Free and Open Indo-Pasific (FOIP)*, *Rebalance to Asia*, Postur Pertahanan Amerika Serikat di Asia-Pasifik, *Freedom of Navigation Operations (FONOPs)* dan Kerjasama Keamanan Amerika Serikat dengan ASEAN. Sementara sikap yang dilakukan Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme diplomasi ASEAN, Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan gelar kekuatan, Badan Keamanan Laut melaksanakan Operasi Keamanan, dan keterlibatan masyarakat Natuna sebagai implementasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Kehadiran Satuan TNI Terintegrasi di Natuna dan peresmian Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) merupakan wujud nyata Indonesia dalam menjaga kepentingan, pertahanan dan keamanan negara. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Indonesia menjadi aktor yang aktif dalam mencegah eskalasi konflik di LCS dan meningkatkan program atau kerjasama *joint development* di berbagai bidang. Meningkatkan anggaran pertahanan untuk TNI dan keamanan untuk Bakamla RI, membangun postur ideal yang dilengkapi dengan C4ISR, meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara lain dan mengoptimalkan sinergitas antar Lembaga/Instansi yang berwenang bersama masyarakat Natuna dengan memanfaatkan Pusinfomar.

Kata Kunci : *Geomaritim, Restrukturisasi, US Pasific Command, Keamanan Maritim Indonesia, Laut China Selatan.*

¹ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Abstract - United States Pacific Command (US PACOM) is a US military command that has an Area of Responsibility in the Asia-Pacific region. Security developments are important, especially the modernization of China's military power. The US needs to reassess its strategy, defense posture and strength with restructuring the US PACOM become the United States Indo-Pacific Command (US Indo-Pacom). The US wants to ensure that the Indo-Pacific is free from anything that could interfere their interests, especially with China building military facilities in the South China Sea (SCS). The SCS area is relatively unstable and can be a threat to Indonesia's Maritime Security if there are contingencies. This study analyzes the US strategy in order to maintain its hegemony in the SCS and to find out Indonesia's efforts in preventing conflicts in the SCS so Indonesia can maintaining its maritime security. Using a qualitative method with a descriptive case study approach, researcher founds five major US strategies used to maintain its hegemony in the SCS, they're The Free and Open Indo-Pacific (FOIP), Rebalance to Asia, The US Defense Posture in Asia-Pacific, Freedom of Navigation Operations (FONOPs) and The US Security Cooperation with ASEAN. While Indonesia is to using the ASEAN diplomacy mechanism, the Indonesian National Armed Forces (TNI) shows its force, the Maritime Security Agency carries out security operations, and the involvement of the Natuna people as the implementation of the Indonesian Universal People's Defense System. The presence of the Integrated Military Unit in Natuna and the Inauguration of the Maritime Information Center (Pusinfomar) is a tangible manifestation of Indonesia in protecting the country's interests, defense and security. Recommendations that can be given are Indonesia being an active actor in preventing escalation of conflict in the SCS and increasing joint development programs or cooperation in various fields. Increasing the defense budget for the TNI and security budget for Bakamla RI, building an ideal posture equipped with C4ISR, enhancing defense and security cooperation with other countries and optimizing synergy between authorized institutions / agencies and the Natuna people by utilizing Pusinfomar.

Keywords : Geomaritime, Restructuring, US Pacific Command, Indonesian Maritime Security, South China Sea.

Pendahuluan

United States Pasific Command (US PACOM) merupakan komando militer Ameika Serikat yang memiliki Area Of Responsibility (AOR) atau area pertanggungjawaban di lingkup Asia-Pasific yang membentang dari Antartika ke Kutub Utara dan Pantai Barat Amerika Serikat hingga perbatasan pantai barat India.⁴ Pada kawasan

pasifik terdapat tren strategis yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kondisi kawasan jangka panjang. Hal yang berpotensi untuk memiliki pengaruh yang kuat diantaranya adalah faktor demografi atau penduduk, faktor perdagangan dan khususnya sumber daya karena semuanya memiliki ketergantungan yang besar sehingga dapat memberikan kepastian yang relatif mengenai perkiraan kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Namun perkiraan tersebut dapat menjadi semakin kompleks apabila

⁴ About USINDOPACOM. "United States Indo-Pasific Command" Retrieved from <https://www.pacom.mil/About-USINDOPACOM/>, diakses pada 6 Mei 2019.

dikombinasikan dengan tren strategis lain, misalnya mengenai geopolitik, geostrategi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi.

Amerika Serikat menganggap bahwa kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan yang penting dan harus dijaga kestabilan dan keamanannya. Namun di kawasan ini terdapat tantangan tradisional yang dapat berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan. Tantangan tersebut diantaranya adalah kejahatan transnasional, terorisme yang disponsori oleh aktor negara maupun non negara, perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, persebaran senjata dan teknologi yang sensitif atau berbahaya, negara berkembang yang ekonominya tumbuh dengan cepat melakukan modernisasi alutsista dan perluasan militer, krisis kemanusiaan, bencana alam, sengketa wilayah, perselisihan pengelolaan sumber daya alam, dan sebagainya.

Kawasan Asia-Pasifik menunjukkan adanya perkembangan yang sangat signifikan dalam berbagai hal selama beberapa tahun terakhir.⁵ Amerika Serikat merasa perlu untuk melakukan

⁵ Christian Le Mière, 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century*, Routledge

penilaian kembali mengenai strategi, postur pertahanan dan kekuatan. Pertimbangan tersebut melihat dari segi geopolitik, ekonomi, diplomasi, perkembangan dan pertimbangan militer, serta politik dalam negeri. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat adanya beberapa tantangan baru yang muncul dapat meningkatkan resiko atau memperburuk keadaan salah satunya adalah usaha perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh China sehingga perlu melakukan *balancing* atau penyeimbangan. Tindakan yang dilakukan China tersebut juga turut membuat sebagian besar dari negara-negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik menjadi lebih peka terhadap pertumbuhan ekonomi, kekuatan politik, dan militer China yang semakin koersif.

Penguatan Strategi *Balancing* Pemerintah Amerika Serikat sudah dimulai dari tahun 2012 dengan membuat Panduan Strategi Pertahanan 2012 dan Strategi Maritim Asia-Pasifik Agustus 2015 disiapkan untuk Kongres.

⁶Berdasarkan penemuan yang dilakukan

⁶ Center for Strategic and International Studies (CSIS) "Asia-Pacific Rebalance 2025 Capabilities, Presence, and Partnerships" retrieved from <https://www.csis.org/analysis/asia-pacific-rebalance-2025>

diakses pada 10 Oktober 2019

oleh peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) rencana dan tindakan yang dilakukan oleh Komando Pasifik Amerika Serikat (*US PACOM*) dalam hal menjaga pertahanan dan keamanan di lingkup Asia-Pasifik selaras dengan strategi dan program dari *Departement Of Defense* (DOD) Amerika Serikat. Namun rencana *balancing* tidak akan cukup untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kekuatan militer.

CSIS menyatakan bahwa ada empat faktor penting yang mengharuskan Amerika Serikat melakukan penilaian kembali strategi khususnya dalam bidang pertahanan untuk dapat melaksanakan *balancing* di Asia Pasifik.⁷ Pertama, pada masa pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat masih belum jelas atau konsisten dalam mengartikulasikan strategi pada wilayah Asia-Pasifik, terutama mengenai kebangkitan kekuatan China. Kemampuan *Departement Of Defense* (DOD) yang terbatas karena adanya pemotongan anggaran pertahanan pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Ketiga, Pada saat Amerika Serikat

merencanakan perubahan postur militer dan melakukan pengembangan terhadap kemampuan militer terdapat tantangan mengenai peningkatan kemampuan musuh *Anti-Access/Area Denial* (A2 / AD) yang berpotensi untuk dikerahkan dalam menghadapi pasukan Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan. China mempunyai strategi militer dengan melakukan investasi secara khusus pada peningkatan kemampuan A2/AD. Keempat, China menempatkan melakukan reklamasi, membangun landasan pesawat terbang dan fasilitas militer di tujuh fitur di Kepulauan Spratly. Keempat hal tersebut menunjukkan bahwa strategi *balancing* Amerika Serikat harus ditingkatkan untuk menjaga pertahanan dan pencegahan ancaman yang mungkin timbul di *Area Of Responsibility* (AOR) Komando Militer Pasifik Amerika Serikat atau *US Pasific Command* (*US PACOM*).

Restrukturisasi komando militer Amerika Serikat adalah kebijakan Presiden Amerika Donald Trump pada Bidang Pertahanan. Komando militer yang semula dinamai *United States Pasific Command* (*US PACOM*) diubah menjadi *United States Indo-Pasific Command* (*US Indo-Pacom*) sejak tanggal 31 Mei 2018. Perubahan Komando

⁷ CSIS, Opcit.

Amerika Serikat tersebut menandakan bahwa adanya penegasan pentingnya kawasan geopolitik Indo-Pasifik yang di dalamnya termasuk India. Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jenderal Mattis, perubahan komando militer tersebut merupakan bentuk pengakuan Amerika Serikat atas peningkatan konektivitas Samudera Hindia dan Pasifik, sekaligus pengakuan terhadap militer India yang semakin kuat.

Amerika Serikat menyatakan bahwa perkembangan dalam hal keamanan yang paling penting diwaspadai di Indo-Pasifik adalah modernisasi kekuatan militer China yang cepat. Cakupan dan skala modernisasi yang telah dilakukan oleh China tersebut menyebabkan keunggulan militer kompetitif dari Amerika Serikat (*US Pacom*) terkikis dalam beberapa tahun terakhir. *US Indo-Pacom* menggunakan pedoman Strategi Pertahanan Nasional 2018 sebagai panduan, yang berfokus pada upaya mendapatkan kembali keunggulan militer kompetitif Amerika Serikat dan memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi Pertahanan Amerika Serikat

tersebut berpusat pada menerjankan dan mempertahankan kekuatan yang mampu melakukan pencegahan perang yang kredibel yang diposisikan untuk dua peran keamanan yang berbeda, yaitu: untuk menang sebelum pertempuran dan jika perlu bersiap untuk bertarung dan menang.

Komando Pasifik Amerika Serikat (*US PACOM*) merupakan komando tempur gabungan dari angkatan bersenjata Amerika Serikat. *US PACOM* adalah komando pertahanan Amerika Serikat yang tertua dan terbesar dari sepuluh komando tempur gabungan yang ada. *US PACOM* memiliki fokus di area timur tengah di *US Central Command* di wilayah Timur Tengah. Dengan adanya kehadiran dan pembangunan kekuatan militer China di kawasan Asia-Pasifik termasuk di dalamnya Laut China Selatan, maka Restrukturisasi *US PACOM* diperlukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di kawasan dan *balancing* kekuatan (Jurianto, 2019). Peneliti memilih fokus penelitian mengenai Laut China Selatan sehingga perlu dibahas mengenai kepentingan dan strategi militer Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan jika

dikaitkan dengan perkembangan kekuatan militer China.

Amerika Serikat hadir di Kawasan Laut China Selatan dengan Kebijakan *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs). Amerika Serikat beranggapan bahwa kebijakan *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) adalah dalam rangka mempertahankan kepentingan nasional dan pencegahan gangguan dan investasi Amerika Serikat. Kebijakan *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) Amerika Serikat diperuntukkan untuk wilayah perairan yang termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga Laut Teritorial suatu negara. Mattis mengungkapkan bahwa perubahan *US Pacom* menjadi *US Indo-Pacom* merupakan tantangan atas kebijakan *Belt and Road Initiatives* (BRI) China dan merupakan bentuk strategi pertahanan nasional Amerika Serikat di Asia Pasifik dalam menghadapi kekuatan China.⁸ Hal ini menimbulkan adanya Perubahan Geomaritim Kawasan terutama di Laut China Selatan.

Perubahan geomaritim kawasan Laut China Selatan disebabkan karena

adanya kepentingan negara-negara besar terhadap perebutan hegemoni di Laut China Selatan. Negara besar tersebut diantaranya adalah China dan Amerika Serikat. Perubahan tersebut dimulai dari China yang memiliki kepentingan di Asia dan sekitarnya, khususnya kepentingan di Laut China Selatan dalam rangka mengamankan jalur perdagangan. Untuk memenuhi kepentingan tersebut China memiliki program yang digagas oleh Presiden Xi Jinping yaitu *One Belt One Road* (OBOR) yang kemudian sekarang berubah nama menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI). *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas Presiden Xi Jinping pada 2015 dipahami sebagai strategi kerja sama regional untuk kawasan Eurasia dan Afrika, serta bukan sekedar proyek konektivitas yang justru lebih dikenal dengan istilah *One Belt One Road* (OBOR).⁹ Menurut peneliti senior Akademi China untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Ekonomi Zhang Jian Ping, menggarisbawahi bahwa strategi *Belt and Road Initiatives* (BRI) tidak hanya mencakup *One Belt*

⁸ Thomas Gibbons-Neff. "Mattis Accuses Beijing of 'Intimidation and Coercion' in South China Sea" Retrieves from <https://www.nytimes.com/2018/06/01/world/asia/mattis-south-china-sea.html> diakses pada 2 Juni 2019.

⁹ *The Belt and Road Initiative*. Retrieved from <http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiative/obor/en/1/1X000000/1X0A36B7.html> diakses pada 9 Mei 2019.

atau *One Road* (OBOR), namun merupakan platform kerja sama regional.

China terus berusaha untuk memperkuat posisinya baik dari segi ekonomi, politik dan militer. Dengan kebijakan *Belt and Road Initiatives*, China memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di kawasan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan jalur ekonomi dan perdagangan antar negara di kawasan ASIA dan sekitarnya. Kemudian dari segi politik dengan adanya program BRI China beranggapan bahwa akan dapat menggunakan lebih banyak pengaruh di bidang politik ketika ekonomi negara-negara di kawasan semakin tergantung kepada China. Penguatan militer dilakukan dengan modernisasi alutsista, penambahan jumlah personil, peningkatan kemampuan dan pembangunan pangkalan militer.

Menurut hemat penulis, kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan yang relatif tidak stabil. *Pertama*, sengketa wilayah perbatasan antara negara-negara di kawasan ASEAN dengan China akibat klaim *nine dashed line*. Laut China Selatan merupakan kawasan yang kompleks, karena

kawasan tersebut diklaim oleh beberapa negara. Republik Rakyat China (RRC) sendiri mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan dengan sembilan garis putus putus (*nine dashed line*) dengan alasan/pertimbangan sejarah.¹⁰ Klaim tersebut menimbulkan protes dari berbagai pihak, terutama negara-negara di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, perbedaan pandangan tentang *nine dash line* ini juga menimbulkan adanya berbagai insiden di Laut China Selatan yang juga melibatkan Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih antara klaim yang dilakukan oleh China dan Hak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di Natuna dan mengancam kedaulatan Indonesia.

Kedua, kehadiran militer China di kawasan Laut China Selatan membuat khawatir negara-negara yang berada di kawasan dan negara-negara maju yang memiliki kepentingan seperti Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena negara maju khawatir apabila terjadi gangguan pada

¹⁰Surya Wiranto, 2016. Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional. Yogyakarta, PT Leutika Nouvalitera Cetakan Pertama Maret 2016.

SLOC dan SLOT atau distribusi ekonomi mereka yang melewati kawasan Laut China Selatan karena hadirnya militer China pada kawasan tersebut. Mereka memanfaatkan Laut China Selatan sebagai jalur distribusi pasokan energi dari wilayah Timur Tengah ke negara mereka dan sebaliknya. Pada aspek militer, China terus memperkuat kemampuan dan kekuatan militernya di kawasan Laut Cina Selatan. China membangun pangkalan militer darat, laut dan udara di kawasan Laut China Selatan dan telah menyelesaikan pembuatan landasan udara di pulau karang *Fiery Cross Reef*.

China juga mengembangkan Perang *Hybrid* di kawasan Laut China Selatan. Perang *hybrid* menggunakan kombinasi metode militer dan nonmiliter di masa damai untuk mencapai tujuan militer tradisional dan dengan demikian mengubah fakta yang ada di lapangan tanpa memicu konflik yang sebenarnya. China menggunakan pasukan nonmiliter dan paramiliter, seperti Coast Guard dan kapal penindakan perikanan, kapal eksplorasi minyak, platform pengeboran minyak, dan kapal komersial, dan kapal nelayan yang terdaftar di China. Hal tersebut dilakukan oleh China dengan tujuan untuk menekankan pengaruh dan

menegaskan klaim teritorial dan maritim China di Laut Cina Selatan.

Ketiga, hadirnya Amerika Serikat dengan *US Indo-Pacom* dan kebijakan *Freedom of Navigation Operations (FONOPs)*. Kedatangan Amerika Serikat memiliki maksud *Balance Of Power* atau menyeimbangi kekuatan China agar tidak mendominasi kawasan Laut China Selatan. Namun, justru situasi di Laut China Selatan semakin memanas setelah Angkatan Laut AS mengirim dua kapal *destroyer* (kapal perusak) berpeluru kendali untuk menantang China di Laut Cina Selatan. *Destroyer* Angkatan Laut Amerika Serikat kelas *Arleigh Burke* - *USS Spruance* dan *USS Preble* - melakukan operasi kebebasan navigasi pada hari Senin, 11 Februari 2019 berlayar dalam jarak 12 mil laut dari pos-pos Cina yang berada di Kepulauan Spratly.¹¹ Menurut Komandan Clay Doss seorang pembicara di Armada Angkatan Laut ketujuh Amerika Serikat, tujuan tindakan tersebut adalah untuk menantang klaim maritim China yang berlebihan dan mempertahankan akses jalur laut Amerika. Ia melanjutkan bahwa hal

¹¹ Ryan Pickrell, "US Navy warships just challenged China with a South China Sea sail-by operation, and Beijing is furious" Retrieved from <https://taskandpurpose.com/navy-south-china-sea-sailby> diakses pada 6 September 2019

tersebut untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan. Dari permasalahan tersebut peneliti melihat bahwa China dan Amerika Serikat memiliki *Area Of Interest (AOI)* yang sama yaitu di kawasan Laut China Selatan.

Ketiga hal yang menyebabkan tidak stabilnya kawasan Laut China Selatan tersebut mengakibatkan eskalasi kekhawatiran bagi negara-negara yang berada di kawasan terutama ASEAN apabila terjadi konflik bersenjata apabila ketegangan di Laut China terus berlanjut. Indonesia yang menjadi salah satu negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan tidak dapat memungkiri bahwa bisa terlibat dan menjadi salah satu medan peperangan mengingat Laut China Selatan berbatasan langsung dengan wilayah Natuna. Hal tersebut menyebabkan adanya kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang berkaitan dengan keamanan maritim Indonesia.

Indonesia menjadi *Sea Line on Trade (SLOT)* dan *Sea Lanes of Communication (SLOC)* dunia. Selain itu empat dari

Sembilan *Choke Point* Dunia ada di Indonesia yaitu di Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Makassar. Keempat *Choke Point* tersebut terhubung melalui tiga Alur Kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI merupakan Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur Laut Kepulauan Indonesia membentang pada bagian Selatan dan bagian Utara sebagai wujud pertanggungjawaban Indonesia sebagai *Archipelagic State*. (Marsetio, 2014).¹²

Indonesia yang memiliki posisi geografi yang strategis menjadi *center of gravity* di kawasan Asia Pasifik dan Perairan Indonesia adalah jalur distribusi ekonomi dunia. Indonesia merupakan negara penting bagi negara-negara yang memiliki ketergantungan yang besar kepada transportasi laut. Posisi geografis Indonesia mengharuskan Indonesia memiliki kepekaan atau kewaspadaan terhadap Lingkungan Maritim (*Maritime Domain Awareness, MDA*). Kewaspadaan Lingkungan Maritim diperlukan dalam upaya

¹² Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*, Universitas Pertahanan. Jakarta.

mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia, terciptanya kondisi laut yang bebas dari ancaman termasuk akibat dari perubahan geomaritim kawasan. Geomaritim kawasan yang dimaksud adalah di Laut China Selatan karena peneliti memilih fokus study kasus Laut China Selatan.

Penulis memiliki harapan bahwa *Area Of Interest (AOI)* Amerika Serikat dan China saat ini yaitu kawasan Laut China Selatan dapat stabil. Namun hal yang perlu menjadi perhatian adalah posisi Indonesia saat ini berada dalam ketidakpastian dalam hal keamanan karena besarnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) di tengah negara-negara yang terlibat ketegangan dalam kawasan Laut China Selatan. Hal tersebut berpeluang dalam menimbulkan konflik karena ketidakstabilan kawasan Laut China Selatan yang berkaitan dengan adanya tarik-menarik konstelasi kekuatan besar dunia termasuk didalamnya Amerika Serikat. Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan segala peluang dan resiko yang bisa terjadi kedepannya.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian tata cara, aturan dan hukum

tertentu yang telah ditentukan berlandaskan kaidah ilmiah yang berlaku pada saat melakukan suatu penelitian, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Herdiansyah, 2010).¹³ penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami dan menjawab permasalahan penelitian.

Metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi arti yang bersumber dari masalah kemanusiaan atau masalah sosial. Penelitian kualitatif prosesnya melibatkan usaha yang penting yaitu; merangkai prosedur; mengajukan pertanyaan; mengumpulkan dokumen atau data dari partisipan atau informan secara spesifik. Kemudian menganalisis dokumen atau data dengan metode induktif, menyusutkan, verifikasi dan interpelasi makna dari permasalahan yang diteliti.

Penelitian kualitatif mengaplikasikan cara pandang induktif, yang memiliki fokus kepada arti individual, dan mengartikan kepada kompleksitas suatu permasalahan

¹³ Haris Herdiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

(Creswell, 2013).¹⁴ Kemudian Creswell menjelaskan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya adalah: fenomenologi, studi kasus, penelitian partisipatoris, etnografi, analisis wacana, naratif dan grounded theory (Creswell, 2013).¹⁵

Penulis memilih penelitian kualitatif karena memiliki kelebihan yaitu deskripsi dan intepetasi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Penelitian dapat berjalan secara efektif dalam rangka mencari tanggapan dan pandangan terhadap rumusan masalah. Kemudian penelitian kualitatif lebih bersifat fleksibel terhadap analisa dengan temuan di lapangan. Serta *On deep interview* dilakukan dalam rangka mempertajam analisa dan bentuk triangulasi atas temuan data di lapangan. Lebih lanjut Penulis menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif. Menurut Yin studi kasus merupakan suatu proses penyelidikan yang bersifat empiris dengan cara menginvestigasi suatu fenomena atau peristiwa kontemporer pada konteks kehidupan

yang terjadi (nyata), terutama pada saat batas antara fenomena atau peristiwa dan konteksnya tidak jelas. Kemudian tujuan dari studi kasus dalam penelitian adalah dalam rangka menguraikan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa atau kasus tersebut bisa terjadi. Penelitian Studi Kasus tidak hanya menjawab permasalahan penelitian mengenai “*what*” atau apa objek penelitian, namun lebih luas, komprehensif dan menyeluruh mengenai “*why*” atau mengapa dan “*how*” atau bagaimana.

Subjek penelitian dari tesis penulis secara keseluruhan terdapat 7 informan. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai informan. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama adalah Pemerintah atau Lembaga yang bertindak sebagai Regulator dan Operator kemudian yang kedua adalah Pengamat. Regulator merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai pembuat dan penentu kebijakan. Operator merupakan lembaga yang berperan sebagai pelaksana tugas. Pemerintah atau Lembaga tersebut diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan,

¹⁴ John W Creswell, 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ke 3. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

¹⁵ *ibid*

Mabesal, Guspurla Koarmada I dan Bakamla RI. Pengamat merupakan subyek yang memiliki latar belakang sebagai peneliti, pengamat, ahli, maupun akademisi diantaranya adalah Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, M.M dan Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Moch Jurianto, S.E, M.M.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Amerika Serikat dalam rangka mempertahankan hegemoni di Laut China Selatan.

Amerika Serikat memiliki concern terhadap perkembangan yang terjadi di Kawasan Indo-Pasifik baik dari sisi geopolitik, geostrategi dan geoekonomi. Kawasan ini penting bagi Amerika Serikat terkait dengan *global interest*.

¹⁶Dalam rangka melindungi kepentingan tersebut Amerika Serikat merasa perlu untuk melakukan perluasan hegemoni yang ditunjukkan dengan penerapan beberapa kebijakan dan strategi. Kebijakan tersebut diantaranya adalah:

a. *Free and Open Indo-Pasific (FOIP)*

¹⁶Departement Of Defense, United States Of America. "Asia Pasific Maritime Security Strategy" Retrieved from https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF diakses pada 6 Mei 2019.

Menurut perspektif dari Amerika bahwa negara-negara Indo-Pasifik menghadapi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menantang kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat dirilis pada bulan Desember 2017, mengakui hal yang paling diwaspadai bagi Amerika Serikat dan negara mitra Amerika Serikat adalah meningkatnya persaingan antara bebas dan represif mengenai visi tatanan internasional di masa depan. Amerika menyatakan akan dengan keras melawan berbagai upaya untuk membatasi otonomi dan kebebasan negara-negara Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada 30 Juli 2018 menyatakan bahwa prakarsa Indo-Pasifik menitikberatkan kepada 3 bidang yang akan menjadi titik fokus yaitu bidang ekonomi, bidang keamanan dan tata kelola pemerintahan. Amerika Serikat dan negara mitra percaya bahwa cara yang paling baik dalam mencegah konflik yaitu dengan memperkuat nilai-nilai yang mendukung kebebasan, kemajuan, keamanan dan kesejahteraan negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik.

b. *Rebalance to Asia*

Presiden Amerika Serikat Obama pada bulan November 2011 menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang berbalik memperhatikan potensi luas kawasan Asia Pasifik. Pernyataan tersebut adalah penegasan bahwa Amerika Serikat melakukan *balancing* ke kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut menandakan akan pentingnya kawasan Asia Pasifik penting bagi kepentingan Amerika Serikat. *Balancing* di pemerintahan Obama dimulai atas kebijakan yang telah dilaksanakan oleh George W. Bush dan pemerintahan sebelumnya seperti keterlibatan Amerika Serikat di KTT Asia Timur dan melakukan kerjasama dengan ASEAN.

Secara keseluruhan, peningkatan fokus ini di Asia dan Pasifik mendapatkan dukungan di Kongres, namun muncul kekhawatiran mengenai apakah administrasi telah merencanakan strategi untuk mengatasi sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan militer yang diperlukan dalam rangka mendukung kehadiran Amerika Serikat di kawasan tersebut. Mencari perspektif eksternal tentang pendekatan administrasi, Kongres mengharuskan Departemen Pertahanan untuk melakukan penilaian independen

terhadap Strategi dan postur pasukan Amerika di Asia-Pasifik di bawah Otorisasi Pertahanan Nasional 2012.

Penelitian dari *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* 2012 menemukan bahwa dibutuhkan rancangan administrasi yang lebih jelas mengenai strategi Amerika Serikat dalam menjelaskan persyaratan untuk mengembangkan postur pertahanan. CSIS mencatat bahwa *US PACOM* dapat mensyaratkan postur kekuatan yang pada masa damai memungkinkan *US PACOM* untuk membangun kapasitas mitra, bekerja sama mengenai tantangan umum seperti bantuan kemanusiaan, melakukan pelatihan bersama dan gabungan serta latihan untuk meningkatkan interoperabilitas, dan sehingga pada masa perang dapat mendukung Amerika Serikat mencapai tujuan. Untuk itu CSIS membuat rekomendasi, termasuk strategi *rebalancing* keterlibatan regional yang lebih baik pada *US PACOM* dan dengan lembaga pemerintah lainnya seperti; penempatan sebuah kapal selam di Guam; penyebaran komando amfibi kedua di Pasifik; pengerahan *Terminal High Altitude Area Defense battery* ke Guam; konstruksi pipa bahan bakar

kedua di Guam; dan penyebaran rotasi pasukan A.S. ke Korea Selatan. Banyak rekomendasi ini selanjutnya dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan, dan Kongres telah menyetujui permintaan tahunan Departemen untuk konstruksi militer regional.

Sekretaris Pertahanan Ashton Carter menyatakan bahwa, di tengah upaya penyeimbangan kembali, hubungan Amerika Serikat dengan China akan menjadi yang kompleks, mencampurkan elemen kerja sama dan kompetisi. Kebijakan rebalancing Amerika Serikat berupaya menciptakan ruang untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran di seluruh kawasan sambil mencegah agresi atau koersi China dan membela kepentingan Amerika Serikat.

c. Postur Pertahanan Amerika Serikat di Asia-Pasifik

Pengembangan Postur Pertahanan Amerika Serikat sesuai dengan Konsep Keamanan Maritim jika dilihat dari perspektif militer yang berfokus kepada usaha untuk melindungi kesatuan atau integritas wilayah teritorial dari ancaman serangan atau negara lain. Kemampuan Amerika Serikat saat ini yang ditempatkan atau secara rutin

digunakan di Asia-Pasifik adalah termasuk proyeksi kekuatan dari kelompok-kelompok serangan kapal induk, pembom strategis, dan kapal selam rudal; pertahanan rudal balistik dari jaringan instalasi dan platform di Jepang, Korea, Guam. Kedepannya kapal-kapal angkatan laut yang dilengkapi Aegis; kemampuan antisubmarine warfare (ASW) di kapal, kapal selam, dan pesawat patroli yang beroperasi di seluruh kawasan Asia-Pasifik; keunggulan udara dari 4G dan 5G yang dikerahkan ke Jepang dan Korea; dan kemampuan ISR dari yang berbasis ruang hingga sistem taktis yang menyediakan peringatan dini.

Restrukturisasi komando militer Amerika Serikat adalah kebijakan Presiden Amerika Donald Trump pada Bidang Pertahanan. Komando militer yang semula dinamai United States Pacific Command (US Pacom) diubah menjadi United States Indo-Pacific Command (US Indo-Pacom) sejak tanggal 31 Mei 2018. Merupakan gabungan dari Armada Angkatan Laut kelima dan ketujuh Amerika Serikat. Armada kelima bertanggung jawab atas pasukan angkatan laut di Teluk Persia, Laut Merah, Laut Arab, dan sebagian Samudra Hindia sejak 1995 setelah jeda 48 tahun.

Sementara armada ketujuh adalah bagian dari Armada Pasifik Amerika Serikat dan merupakan armada terbesar. Dengan adanya restrukturisasi United States Indo-Pacific Command (US Indo-Pacom) yang merupakan gabungan dari armada angkatan laut kelima dan ketujuh Amerika Serikat maka Area Of Responsibility (AOR) atau area pertanggung jawaban US Indo-Pacom juga semakin luas karena mengikuti Area Of Interest yang semakin luas di Indo-Pasifik. Komandan US Indo-Pacom bertanggung jawab atas operasi militer pada daerah yang meliputi lebih dari 100 juta mil persegi (260.000.000 km²), atau sekitar 52 persen dari permukaan bumi, membentang dari perairan lepas Pantai Barat Amerika Serikat ke pantai barat India, dan dari Kutub Utara hingga ke Antartika

d. Freedom of Navigation Operations (FONOPs)

Pengembangan postur militer Amerika Serikat tidak hanya mencakup pembangunan instalasi militer, namun juga kegiatan dan operasi pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Aktivitas ini membantu pasukan AS menjaga kesiapan, sehingga mereka siap untuk merespons secara efektif

terhadap krisis dan kontinjensi yang mungkin timbul.¹⁷ Kegiatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik mencakup kehadiran yang dirancang untuk memastikan dan mencegah, termasuk pengintaian udara dan operasi, latihan, dan pelatihan Freedom of Navigation Operations (FONOPs) untuk meningkatkan kemampuan Amerika Serikat, dan bentuk lain dari kerja sama keamanan regional.

Kehadiran rutin mencakup berbagai kegiatan standar yang dilakukan oleh pasukan AS selama masa damai, seperti patroli kapal United States Navy (USN), interaksi dengan kapal lain di laut, panggilan ke pelabuhan asing, serta penerbangan dan patroli United States Air Force (USAF) di wilayah udara internasional. Aktivitas kehadiran memberikan sinyal stabil dan jaminan kepada sekutu dan mitra Amerika Serikat, mendukung pencegahan potensi serangan musuh, dan secara cepat berkontribusi Amerika Serikat untuk merespon berbagai

¹⁷Departement Of Defense, United States Of America. "Annual Freedom of Navigation Report Fiscal Year 2018/" Retrieved from [https://policy.defense.gov/Portals/11/Document/s/FY18%20DoD%20Annual%20FON%20Report%20\(final\).pdf?ver=2019-03-19-103517-010](https://policy.defense.gov/Portals/11/Document/s/FY18%20DoD%20Annual%20FON%20Report%20(final).pdf?ver=2019-03-19-103517-010) diakses pada 9 September 2019.

kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, pasukan USMC melakukan pelatihan pra-jabatan di wilayah Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara selama timbulnya Topan Soudelor pada Agustus 2015. Kehadiran mereka memungkinkan penyediaan air bersih, logistik, dan lift helikopter dalam waktu dekat ke pulau-pulau yang terkena dampak. Kegiatan pengintaian dan pengawasan udara, seperti yang dilakukan oleh pesawat Amerika Serikat di daerah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan merupakan bagian lain dari aktivitas kehadiran yang rutin dilaksanakan. Misi yang paling utama adalah memberikan informasi kepada pimpinan militer dan pertahanan Amerika Serikat tentang perubahan situasi, misi ini kadang-kadang memancing tanggapan dari target pengawasan.

Menurut Komandan Clay Doss seorang pembicara di Armada Angkatan Laut ketujuh Amerika Serikat, tujuan tindakan tersebut adalah dalam rangka menantang klaim maritim yang dilakukan China secara berlebihan dan dalam rangka mempertahankan akses jalur laut yang dilewati Amerika Serikat. Ia melanjutkan bahwa hal tersebut untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan berlayar, terbang, ataupun

beroperasi dimana diizinkan oleh hukum internasional. Dari permasalahan tersebut peneliti melihat bahwa China dan Amerika Serikat memiliki Area Of Interest (AOI) yang sama yaitu di kawasan Laut Cina Selatan.

e. Kerjasama Keamanan Amerika Serikat dengan ASEAN

Amerika Serikat telah mengembangkan hubungan militernya dengan ASEAN pada 2015, Departemen Pertahanan memutuskan untuk mengirim penasihat pertahanan permanen untuk ke ASEAN dalam rangka meningkatkan koordinasi dan informasi berbagi untuk HA / DR dan keamanan maritim. Inisiatif kerjasama keamanan maritim di kawasan ASEAN adalah upaya Amerika Serikat untuk membangun kapasitas mitra dalam domain maritim dan melakukannya melalui ASEAN.

Upaya-upaya ini dibangun di atas inisiatif baru lainnya untuk adalah untuk memperkuat hubungan antara ASEAN dan militer Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan untuk ASEAN berbagi informasi dengan Departemen Pertahanan dan lembaga-lembaga Amerika Serikat lainnya tentang masalah keamanan Asia Tenggara dan keterlibatan lebih dalam di forum-forum

terkait pertahanan ASEAN. Berikut adalah gambar partisipasi Amerika Serikat dalam Organisasi Regional ASEAN.

Partisipasi Amerika Serikat di Organisasi ASEAN diantaranya adalah:

- 1) *ASEAN Regional Forum*
- 2) *ASEAN Defense Ministers Meeting Plus*
- 3) *East Asia Summit*
- 4) *Expanded ASEAN Maritime Forum*
- 5) *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery*
- 6) *Architecture Gaps and Shortfalls*

Amerika menegaskan komitmen akan pentingnya keamanan wilayah, terjamin dan menguntungkan bagi semua bangsa.

¹⁸Konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka beresonansi dengan sekutu dan bangsa yang bermitra dengan Amerika Serikat di seluruh kawasan dan meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi tata kelola dan dimensi keamanan. Pemerintah Amerika Serikat memiliki keyakinan bahwa harus bertanggung jawab atas rakyatnya dan meyakini bahwa negara yang berlokasi di

kawasan Indo-Pasifik memiliki keyakinan yang sama untuk mendukung nilai tersebut, termasuk negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN).

Kemudian ASEAN membangun konsep “*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*” yang merupakan prakarsa Indonesia dan sebelumnya telah disepakati oleh Menteri Luar Negeri ASEAN.¹⁹ Kesepakatan tersebut mencerminkan sentralitas ASEAN untuk menjawab tantangan perubahan dan gejolak geo-politik dan geo-strategi di kawasan Indo-Pasifik. Konsep tersebut merupakan konsep bersama ASEAN yang dapat mendukung ke arah yang baru bagi kerjasama negara yang berada di kawasan ASEAN dengan negara yang bekerjasama. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang tergabung di ASEAN menyatakan dukungan penuh terhadap Konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.²⁰

¹⁹ “KTT ASEAN Adopsi Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik”. Retrieved from <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/ktt-asean-adopsi-outlook-asean-mengenai-indo-pasifik.html>

diakses pada tanggal 15 Juli 2019

²⁰ ASEAN Sepakati ASEAN Outlook on Indo-Pacific pada KTT ke-34 ASEAN Retrieved from <https://kemlu.go.id/bangkok/id/news/1153/asean-sepakati-asean-outlook-on-indo-pacific-pada-ktt-ke-34-asean>

diakses pada 2 Agustus 2019.

¹⁸ Emmers R, 2004. Security Cooperation in the Asia Pacific: Evolution of Concepts and Practices. In S. S. Tan, & A. Acharya, Asia Pacific Security Cooperation. New York: M.E. Sharpe.

Upaya Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik di Laut China Selatan dan menjaga stabilitas dan keamanan maritim Indonesia

a. Kementerian Luar Negeri

Menurut Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 dalam isu Laut China Selatan, Indonesia menunjukkan sikap yang serius untuk terus menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan.²¹ Hal ini dilakukan dengan cara:

- 1) Berperan aktif dalam negosiasi untuk mendorong ASEAN (termasuk negara claimant states) dan China.
- 2) Mendorong agar claimant states mulai membahas dan menegosiasikan sengketa wilayahnya
- 3) Menghormati territorial integrity berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
- 4) Sebagai anggota ASEAN, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam pengelolaan potensi konflik di

²¹ Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 dalam isu Laut China Selatan Retrieved from <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2FoLoRvY3VtZW50cy9MSopfS2VtZW5sdV8yMDE4LnBkZg==> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Laut China Selatan antara lain dengan menggulirkan prakarsa dan Inovasi termasuk pengadaan workshop²²

- 5) Mendorong agar seluruh pihak dapat mematuhi Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) yang diimplementasikan melalui Code of Conduct in the South China Sea (CoC), serta mematuhi ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea.

Pada Pertemuan ASEAN Post Ministerial Conferences (PMC) Plus One with China yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018, disepakati dan disahkan dokumen Single draft Code of Conduct in the South China Sea (CoC) Negotiating Text. Dokumen ini merupakan pengembangan dan sekaligus implementasi Framework dari CoC yang merupakan inisiatif Indonesia dan telah disepakati 2017 lalu. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan bahwa Single draft Code of Conduct in the South China Sea (CoC) Negotiating Text ini memiliki nilai penting dalam rangka melakukan negosiasi dengan China demi meredam ketegangan di Laut China Selatan.

²² Ibid

Indonesia adalah negara yang juga memprakarsai konsep Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Treaty, merupakan perjanjian yang melingkupi kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian tersebut bertujuan dalam rangka mewujudkan kawasan yang memiliki mutual trust and confidence. Pada 16 Mei 2013 di Washington D.C., mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengungkapkan gagasan untuk membentuk Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation di kawasan Asia Pasifik di hadapan konferensi yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS). Indo-Pacific Treaty dianggap memiliki inti pemikiran atau konsep yang sama dengan Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Indonesia mengusulkan perlunya penebalan kerja sama di Kawasan Samudra Pasifik dan Hindia melalui Indo-Pacific Outlook yang fokus akan kerja sama maritim, konektivitas, dan pencapaian SDGs. Indonesia juga berhasil mendorong pengesahan EAS Leaders' Statement on Combatting Marine Plastic Debris yang merupakan prakarsa Indonesia serta mendorong pemajuan sistem perdagangan free and fair, penguatan

mekanisme regional currency swap dalam kerangka ASEAN+3 (ASEAN bersama dengan China, Jepang dan Korea), sinergi kebijakan dengan Lembaga Internasional seperti International Monetary Fund (IMF), serta penguatan fundamental perekonomian domestik serta perlunya menyelesaikan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di tahun 2019.²³

b. Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan menjaga Pertahanan Indonesia dan khususnya bagi stabilitas dan Keamanan Maritim Indonesia membagi kebijakan menjadi Kebijakan Eksternal dan Kebijakan Internal.

Kebijakan Eksternal dari Kementerian Pertahanan dilaksanakan dengan meningkatkan kerjasama Internasional secara bilateral maupun multilateral dalam mengatasi isu keamanan, penanganan konflik dan ancaman nyata, serta peningkatan kapabilitas pertahanan. Kerjasama secara bilateral dilakukan dengan kerjasama dalam upaya peningkatan SDM pertahanan, pemeliharaan dan penguatan stabilitas keamanan kawasan maupun perbatasan,

²³ Ibid

mempererat kerjasama pertahanan dan kerjasama dalam bidang industri pertahanan. Sedangkan untuk kerjasama multilateral dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian kawasan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam mencari solusi damai disetiap permasalahan.

c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dengan jelas menyebutkan bahwa²⁴ Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) merupakan komponen utama pertahanan negara. Dalam hal menjaga stabilitas Pertahanan dan keamanan maritim Indonesia dalam khususnya di Natuna sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, TNI memiliki Kebijakan Pertahanan. Hal tersebut dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "...pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan"²⁵. Implementasi dari

Kebijakan TNI adalah dengan penggelaran unsur-unsur kekuatan baik ditingkat Mabes TNI maupun Angkatan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kontijensi dan ancaman nyata.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Satuan TNI Terintegrasi di Natuna adalah bentuk wujud finalisasi dari salah satu program pada perencanaan strategis (Renstra) jangka menengah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membangun kekuatan TNI yang diharapkan akan bisa untuk memberikan daya tangkal (*deterrence effect*) terhadap ancaman khususnya di wilayah perbatasan. Panglima TNI mengungkapkan bahwa rencana untuk kedepannya Satuan TNI Terintegrasi akan menjadi salah satu bagian dari Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) yang akan segera dibentuk.

TNI AL dalam hal ini Kepala Staff Angkatan Laut bertugas membina kekuatan TNI matra laut (Binkuat) sedangkan pengerahan dan penggunaan kekuatan (Gunkuat) ada di Panglima TNI. Hal ini berlaku di masa damai maupun konflik. Apabila terjadi konflik maka TNI AL akan menyiapkan unsur/Alutsista guna dikerahkan sesuai Rencana Operasi TNI yang merupakan

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

²⁵ Ibid

perintah Panglima TNI. Berkaitan dengan operasi keamanan maritim di Natuna, TNI AL akan menyiapkan KRI, Pesawat, Marinir dan Pangkalan yang merupakan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL untuk menjadi bagian dari Satuan Terintegrasi TNI di Natuna. Komando dan Kendali dalam operasi ada di Panglima TNI dan bisa didelegasikan kepada Pangkoptama Operasi dalam hal ini Panglima Koarmada I.

Gugus Tempur Laut Komando Armada I atau (Guspurla Koarmada I) merupakan Komando Pelaksana Operasi di bawah Pangarmada I, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan operasi tempur laut dan operasi amfibi guna mendukung pengendalian laut dan pencapaian tujuan strategis dalam rangka penegakkan kedaulatan dan hukum di laut.

d. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI)

Bakamla RI merupakan pelaksana fungsi Universal Coast Guard di Indonesia seperti Maritime Security, Maritime Defense, Maritime Safety, dan Maritime SAR. Hal ini sesuai dengan konsep keamanan maritim yaitu setiap hal yang berkaitan dengan keamanan maritim konsep ini selalu mengarah ke

kekuatan seperti Angkatan Laut maupun Coast Guard. Hal ini disebabkan karena keduanya adalah operasional atau pelaksana yang mengawasi hal terkait dengan power enforcement body dan maritime security deterrence.

Dasar hukum Bakamla²⁶ adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla. Menurut Perpres No.178 Tahun 2014 tentang Bakamla tugas dari Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemudian fungsi Bakamla adalah penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang dituangkan pada Pasal 3 Perpres No.178 Tahun 2014 tentang Bakamla.²⁷ Pada Pasal 4 Perpres No.178 Tahun 2014 tentang Bakamla memuat kewenangan dari Bakamla diantaranya adalah melakukan pengejaran seketika (hot pursuit); memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

²⁷ Perpres No.178 Tahun 2014 tentang Bakamla

mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.²⁸

Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan wilayah laut secara terintegrasi yang menggabungkan seluruh potensi sumber daya yang menjadi stakeholder kemaritiman, Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. meresmikan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI di Mabes TNI Cilangkap pada tanggal 6 Januari 2020. Pusat Informasi Maritim TNI merupakan bentuk sederhana dari sinergi berbagi informasi dan upaya meningkatkan kesadaran bidang maritim. Keberadaan TNI dalam mengawal perairan nusantara tidak lepas dari pelaksanaan tugas *stakeholder* lain, sehingga diperlukan pemembentukan Pusat Informasi Maritim TNI.

Kesimpulan

Amerika Serikat memiliki 5 Strategi besar dalam rangka mempertahankan hegemoninya di Laut China Selatan yaitu: 1. *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)* berkomitmen untuk menegakkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan

terbuka; 2. *Rebalance to Asia* sebagai upaya menciptakan ruang untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran di seluruh kawasan sambil mencegah agresi atau koersi China dan membela kepentingan Amerika Serikat.; 3. Postur Pertahanan Amerika Serikat di Asia-Pasifik yaitu *US Indo-Pacom* dan akan terus berkembang selama dekade mendatang; 4. *Freedom of Navigation Operations (FONOPs)* yaitu kegiatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik mencakup kehadiran yang dirancang untuk memastikan dan mencegah, termasuk pengintaian udara dan operasi, latihan, dan pelatihan *Freedom of Navigation Operations (FONOPs)* untuk meningkatkan kemampuan Amerika Serikat, dan bentuk lain dari kerja sama keamanan regional; dan 5. Kerjasama Keamanan Amerika Serikat dengan ASEAN dalam bentuk kerjasama keamanan maritim sebagai upaya Amerika Serikat untuk membangun kapasitas mitra dalam domain maritim dan melakukannya melalui jalur ASEAN.

Kementerian Luar Negeri Indonesia meningkatkan peran dan kontribusi dalam penyelesaian sengketa teritorial di kawasan, melalui strategi peningkatan peran Indonesia dalam

²⁸ Ibid

penanganan sengketa Laut China Selatan melalui diplomasi mekanisme ASEAN. Indonesia menjadi pihak yang mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai dan memprakarsai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*. Kementerian Pertahanan membagi upaya pencegahan konflik di Laut China Selatan dan menjaga stabilitas dan keamanan maritime Indonesia dalam Kebijakan Eksternal dan Kebijakan Internal yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Pertahanan Negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk Satuan TNI Terintegrasi di Natuna sebagai wujud pembangunan kekuatan TNI yang diharapkan akan bisa untuk memberikan daya tangkal (*deterrence effect*) terhadap ancaman khususnya di wilayah perbatasan. Gugus Tempur Laut Komando Armada I atau (Guspurla Koarmada I) menyatakan bahwa wilayah Natuna merupakan salah satu wilayah yang menjadi daerah prioritas operasi. Pusat Informasi Maritim TNI (Pusinfomar) dibentuk dalam rangka mendukung upaya pengelolaan wilayah laut secara terintegrasi yang menggabungkan seluruh potensi sumber daya yang menjadi *stakeholder*

kemaritiman. Masyarakat Natuna ikut terlibat dalam hal pemberitahuan dan pertukaran informasi dengan *stakeholder* terkait sebagai wujud Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla RI) merupakan pelaksana fungsi Universal Coast Guard di Indonesia seperti Maritime Security, Maritime Defense, Maritime Safety, dan Maritime SAR. Bakamla melakukan beberapa jenis operasi baik yang dilakukan secara mandiri maupun kerjasama.

Berikut rekomendasi upaya menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan regional, khususnya terkait mencegah sengketa di Laut China Selatan mengarah kepada konflik militer terbuka, dan menjaga keamanan maritim Indonesia:

- a. Dalam rangka menjamin mencegah potensi konflik di Laut China Selatan:
 - Mengamalkan politik non-blok dan mendorong pengamalan dan ketaatan dalam melaksanakan *Code Of Conduct*.
 - Pada sisi perebutan Sumber Daya Alam atau energi di Laut China Selatan akan lebih baik

bahwa negara-negara bisa membuat kesepakatan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam dan energi di daerah tersebut. Bagian mana yang menjadi hak suatu negara dan bagian mana yang dapat dikelola bersama-sama.

- Setiap negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan perlu mengamalkan asas keterbukaan/transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan (*confidence and trust building*) semakin menguat.
- Meningkatkan program atau kerjasama *joint development* di berbagai bidang yang dapat menekan potensi konflik di Laut China Selatan sehingga dapat mengatur mekanisme pencegahan potensi konflik.
- Indonesia telah melaksanakan program workshop mengenai inisiasi penyelesaian konflik Laut China Selatan, oleh karena itu perlu lebih digalakkan secara efektif.
- Indonesia harus senantiasa menjadi aktor yang aktif dalam mendorong penyelesaian sengketa wilayah Laut China

Selatan secara damai di antara *claimant states*.

- b. Bidang Kebijakan Pertahanan dan Keamanan.
 - TNI memang sudah membentuk Satuan TNI Terintegrasi di Natuna sebagai wujud pembangunan kekuatan TNI yang diharapkan akan bisa untuk memberikan daya tangkal (*deterrence effect*) terhadap ancaman khususnya di wilayah perbatasan Natuna, namun masih perlu untuk mewujudkan pertahanan ideal sesuai dengan *Minimum Essential Force* (MEF) apabila Indonesia menginginkan *deterrence effect* dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Indonesia selalu mengedepankan jalur diplomasi, namun diplomasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki *bargaining power*. Selain faktor kekayaan Sumber Daya, Pertahanan dan Keamanan yang kuat merupakan salah satu faktor kunci sukses agar diplomasi yang dilaksanakan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Apabila Indonesia ingin menjadi negara

yang kuat maka akan lebih baik apabila ada peningkatan anggaran pertahanan supaya Indonesia dapat menuju *Ideal Essential Force* (IEF).

- Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) yang dianggap dapat menjadi Indonesian Coast Guard harus didukung dengan infrastruktur atau peralatan yang mumpuni seperti pemenuhan kebutuhan jumlah armada kapal yang disesuaikan sesuai dengan tupoksi Bakamla RI mengingat hanya sedikit jumlah kapal Bakamla RI yang mampu beroperasi namun harus mampu mengcover wilayah yurisdiksi Indonesia yang sangat luas. Meskipun dapat menjalin kerjasama dengan stakeholder lain untuk menutupi kekurangan tersebut namun tetap perlu adanya peningkatan anggaran guna memenuhi kekurangan kebutuhan tersebut agar Bakamla RI sebagai Coast Guard dapat berjalan dengan baik.
- Pusat Informasi Maritim TNI (Pusinfomar) baru dibentuk dalam rangka mendukung

upaya pengelolaan wilayah laut secara terintegrasi yang menggabungkan seluruh potensi sumber daya yang menjadi stakeholder kemaritiman. Maka perlu diadakan sosialisasi atau penyuluhan secara massive agar seluruh stakeholder mengetahui keberadaan Pusinfomar, termasuk masyarakat agar pengelolaan dan perlindungan wilayah laut dapat berjalan secara maksimal.

- Pengamanan ALKI merupakan prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia Poros Maritim Dunia di bidang pertahanan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan level kesiagaan di setiap pangkalan Angkatan Laut terdekat ALKI, dilengkapi dengan kapabilitas kekuatan udara dan Command, Control, Communication, Computer, Intellegence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR).
- Menjaga dan meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara lain baik secara bilateral, maupun

multilateral. Kerjasama tersebut tidak dibatasi dengan negara manapun, asalkan menguntungkan bagi Indonesia. Misalnya kerjasama patroli dengan negara yang berbatasan, kerjasama pertukaran informasi, atau lebih banyak dalam menjalin kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan, maka akan lebih banyak prajurit yang dikirim untuk belajar dan berlatih agar kemampuan yang dimiliki prajurit meningkat.

Referensi

Buku

- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ke 3. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Emmers, R. 2004. *Security Cooperation in the Asia Pacific: Evolution of Concepts and Practices*. In S. S. Tan, & A. Acharya, *Asia Pacific Security Cooperation*. New York: M.E. Sharpe.
- Le Mière, Christian. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century*, Routledge
- Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*, Universitas Pertahanan.: Jakarta, .
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wiranto, Surya. 2016. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut*

Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional. Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera Cetakan Pertama Maret 2016.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Perpres No.178 Tahun 2014 tentang Bakamla

Internet

- About USINDOPACOM. "United States Indo-Pacific Command" Retrieved from <https://www.pacom.mil/About-USINDOPACOM/>, diakses pada 6 Mei 2019.
- ASEAN Sepakati ASEAN Outlook on Indo-Pacific pada KTT ke-34 ASEAN Retrieved from <https://kemlu.go.id/bangkok/id/news/1153/asean-sepakati-asean-outlook-on-indo-pacific-pada-ktt-ke-34-asean> diakses pada 2 Agustus 2019.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS) "Asia-Pacific Rebalance 2025 Capabilities, Presence, and Partnerships" retrieved from <https://www.csis.org/analysis/asia-pacific-rebalance-2025> diakses pada 10 Oktober 2019.
- Departement Of Defense, United States Of America. "Asia Pasific Maritime Security Strategy" Retrieved from https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_Security_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF diakses pada 6 Mei 2019.

- Departement Of Defense, United States Of America. "Annual Freedom of Navigation Report Fiscal Year 2018/" Retrieved from [https://policy.defense.gov/Portals/11/Documents/FY18%20DoD%20Annual%20FON%20Report%20\(final\).pdf?ver=2019-03-19-103517-010](https://policy.defense.gov/Portals/11/Documents/FY18%20DoD%20Annual%20FON%20Report%20(final).pdf?ver=2019-03-19-103517-010) diakses pada 9 September 2019.
- "KTT ASEAN Adopsi Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik". Retrieved from <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/ktt-asean-adopsi-outlook-asean-mengenai-indo-pasifik.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2019
- Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 dalam isu Laut China Selatan Retrieved from <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2FoLoRvY3VtZW50cy9MSopfS2VtZW5sdV8yMDE4LnBkZg==> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.
- Pickrell, Ryan "US Navy warships just challenged China with a South China Sea sail-by operation, and Beijing is furious" Retrieved from <https://taskandpurpose.com/navy-south-china-sea-sailby> diakses pada 6 September 2019
- The Belt and Road Initiative. Retrieved from <http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiative/obor/en/1/1X000000/1X0A36B7.html> diakses pada 9 Mei 2019.
- Thomas Gibbons-Neff. "Mattis Accuses Beijing of 'Intimidation and Coercion' in South China Sea" Retrieved from <https://www.nytimes.com/2018/06/01/world/asia/mattis-south-china-sea.html> diakses pada 2 Juni 2019.